

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENSIA DI
PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

MIFTAHUL JANNA
NIM. 10400115062

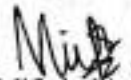
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Gowa, 25 Juni 2019

Penyusun,



Miftahul Janna

Nim:10400115062

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar"**, yang disusun oleh Miftahul Janna, NIM: 10400115062, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata 02 Juli 2019 M
28 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekertaris : Istiqamah, S.H.,M.H
Munaqisy I : Dr. Jumadi, S.H.,MH
Munaqisy II : St.Nurjannah, S.H.,M.H
Pembimbing I : Dr.Rahman Syamsuddin S.H.,M.H
Pembimbing II : Abd Rais Asmar S.H.,M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakutas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

**"PENYELESAIAN PERKARA DESERSI SECARA *IN ARSENIA* DI LINGKUNGAN
PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR"
(Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makassar)**

Disusun dan diajukan Oleh :

Miftahul janna

NIM : 10400115062

Telah disetujui oleh pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi

Pada tanggal : 12 April, 2019

DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing I



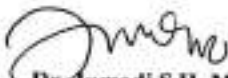
Dr. Rahman Syamsuddin S.H., M.H.
NIP. 198212072009011010

Pembimbing II



Abd Rals Asmar S.H., M.H.
NIP. 198804032015031005

Penguji I



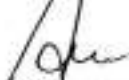
Dr. Jumadi S.H., M.H.
NIP. 196302041994031003

Penguji II



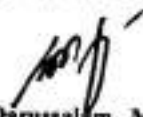
St. Nurjannah S.H., M.H.
NIP. 197608222003122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istikomah S.H., M.H.
NIP. 196801120799503 2 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karuni-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi dengan judul:” Penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran, ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orangtua yang saya cintai yaitu Bapak Isbawaihi dan Ibu Faridah karena doa-doa yang tiada henti beliau panjatkan sehingga Allah SWT selalu memberi kemudahan dan kelancaran disegala urusanku, yang selalu menyemangati, memberi dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti beliau berikan disetiap langkahku serta senantiasa membimbing dan mendampingi dikalah keluh kesahku. Kepada Bapak Terima kasih banyak untuk semua pengorbanan yang Bapak berikan. Kepada Ibu terima kasih banyak telah melahirkan dan tulus merawatku . Tak lupa pula kuucapkan terima kasih banyak kepada Kakakku tercinta Hardianti, A.md.Keb yang senantiasa memberiku semangat, nasihat, perhatian dan doa-doa yang slalu dipanjatkan.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof . Dr. H. Musafir Pababari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;

3. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar;
4. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Abd Rais Asmar S.H.,M.H. selaku pembimbing II. Kedua beliau, ditengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Jumadi, S.H.,M.H. selaku penguji I dan Ibu St.Nurjannah, S.H.,M.H. selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak di Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah memberikan kesempatan dan banyak membantu penulis pada saat penulis melakukan rangkaian penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak Mayor CHK Hasta Sukidi.S.H.,M.H. terima kasih telah memberi banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Kepada Lukman AR S.pd. terima kasih yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun non materi, serta semangat, motivasi, dan selalu mendengar keluhan, memberikan kritikan dan saran yang mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Teman seperjuangan sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini yaitu Ibu Pejabat yang terdiri dari (Nurul Hikmayani Razak S.H, Aidah Apriani, Rezky Ridhoyanti Ramdhani S.H, Aslinda Rahayu), terima kasih untuk semua partisipasi yang telah kalian berikan baik berupa materi maupun non materi, kritik serta saran yang bersifat membangun dan

support yang selalu kalian berikan mulai dari awal perkuliahan hingga saat penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 “VON15” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar khususnya Ilmu Hukum “B” yang selalu memberikan dukungan satu sama lain sejak awal perkuliahan sampai lulus.
12. Teman-teman KKN Angkata 59 khususnya Desa Bilalang Kec.Mamuju Kab.Gowa (Nunu, Eky, Dina, Ainun, Azmi, Susan, Kak Uni, Kak Kemal, Kak Irsan) serta Pakde dan Bude selaku tuan rumah Posko satu, terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga .

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2019
Penulis


Miftahul Janna
Nim:10400115062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Ruang Lingkup Desersi.....	9
B. Peradilan <i>In Absentia</i>	21
C. Pengertian Hukum Pidana Militer.....	26
D. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	42
1. Jenis penelitian	42
2. Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Metode Pengumpulan Data	43
1. Metode Penelitian Pustaka	43
2. Metode Penelitian Lapangan.....	43

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
1. Teknik pengolahan data	44
2. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Desersi Oleh TNI	49
C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara <i>In Absensia</i> Yang Terdakwanya Tidak Ditemukan Di Pengadilan Militer III-16 Makassar	52
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

ABSTRAK

Nama : Miftahul Janna
Nim : 10400115062
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absensia* Di Pengadilan Militer III-16 Makassar, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absensia* yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar? 2) Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana desersi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pada umumnya dimana terdakwa harus hadir dalam persidangan tersebut tetapi dalam perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-16 Makassar Persidangan Tetap dilaksanakan walaupun terdakwa tidak hadir atau tidak ditemukan sehingga disebut persidangan secara *In Absensia*.

Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan anggota TNI yang dirasa kurang sebanding dengan tugas dan pengabdian mereka dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi desersi, diupayakan agar setiap anggota TNI lebih meningkatkan atau benar-benar memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, salah satunya tunduk kepada hukum yang berlaku, setiap anggota TNI diharapkan benar-benar dapat menegakkan hukum disiplin dan tata tertib didalam kesatuan masing-masing, salah satunya meminta ijin atasan/komandan jika meninggalkan kantor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum itu sendiri merupakan peranan terpenting terlaksananya atas segala rangkaian kekuasaan kelembagaan, dan sebagai perantara hubungan sosial antara masyarakat. Hukum adalah serangkaian aturan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Tingkah laku manusia seringkali sangat meresahkan masyarakat disekitarnya dan merugikan negara. Maka dari itu hukum sangatlah penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara maka tanpa adanya kekuatan hukum negara akan haus dengan ketertiban dalam bernegara terhadap seluruh masyarakatnya.

Demi berjalannya ketertiban dalam suatu negara, Indonesia sebagai Negara hukum memiliki angkatan perang yang sering dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹

¹Penjelasan Undang-undang No.34.tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.h.2.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Oleh karenanya, militer tetap memiliki peraturan yang menjadi acuan atas apa yang tidak boleh dilakukan seorang militer.²

Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu “Hukum dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Apabila hukum tersebut yang telah dibina dan dikembangkan oleh pemerintah tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak ditaati oleh masyarakat maka akan menimbulkan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran. Atas kejahatannya atau pelanggaran yang melawan hukum maka negara menindak pelaku kejahatan dengan hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang dimana dimaksudkan pidana umum berlaku bagi setiap orang sedangkan pidana khusus hanya berlaku bagi orang tertentu saja, oleh karena itu prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.³ Berdasarkan peraturan khusus yang diatur terdapat beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum TNI antara lain narkoba, dan

² <http://www.GreenNews.com>, “*Hukum Pidana Militer di Indonesia*”, 03/02/2014, (diakses 21 Januari 2019).

³ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.25. tahun 20016.Tentang*Hukum Disiplin Militer*.h. 5.

pengeroyokan selain kejahatan. Ada pula jenis tindak pidana yang berupa pelanggaran, salah satunya adalah desersi yang artinya pengingkaran tugas atau jabatan tanpa izin (pergi bebas atau meninggalkan) dalam kurung waktu lama dan atau dengan tanpa tujuan kembali. Mengenai proses pembedaannya telah diatur dalam Pasal 85 KUHPM, dimana seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.

Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerja sama yang kompak, kohesi tinggi, dan kepemilikan yang kuat.⁴

Dalam menjalankan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran.⁵

Cara penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda dengan tindak pidana umum, perbedaannya yaitu tindak pidana militer disidangkan oleh oknum militer yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh pegawai negeri sipil murni.

Dalam praktek sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang akan menghambat pelaksanaan persidangan, ini berarti pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan hingga terdakwa dapat dihadirkan. Tetapi lain halnya Dalam proses persidangan militer,

⁴Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahan*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 1996). H.4.

⁵Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2002), h. 223.

jika anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi tidak hadir maka proses hukum tetap berjalan (tetap dapat disidangkan) atau dikenal dengan istilah persidangan secara *In Absentia*. Dalam proses peradilan seperti ini status terdakwa dalam proses persidangan yang berstatus *In Absentia* bukanlah suatu hal yang jarang ditemukan.

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In Absentia*, ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.⁶

Pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya pada masa damai menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Tindak pidana desersi jika tidak disikapi dengan bijak serta tidak segera dicarikan faktor penyebabnya dan menemukan solusinya akan terus terjadi sehingga pada gilirannya tidak hanya dapat menggoncangkan kedisiplinan militer, melainkan juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Dalam tata kehidupan keprajuritan tindak pidana desersi sudah lama berlangsung, hal ini sering terjadi oleh beberapa faktor yang pertama yaitu jenuh dengan peraturan/ingin bebas, terlibat perselingkuhan, mempunyai banyak hutang. Tindak pidana desersi juga dapat merugikan Negara, Terdakwa dan keluarga karena perbuatannya itu ia kehilangan pekerjaan, dan dalam satuan hal ini negara yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik dan melatihnya.

Proses penyelesaian tindak pidana desersi dalam pengadilan militer, ada beberapa tahap yaitu: Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Persidangan dan Tahap pelaksanaan Putusan.

⁶Djoko Prakoso, S.H., *Peradilan In Absentia di Indonesia*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985, h. 54.

Masing-Masing badan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa di lingkungannya. Fungsi Pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.⁷

Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan yang secara teknis, administratif, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana maupun sengketa Tata Usaha TNI yang terjadi di lingkungan militer yang melibatkan prajurit TNI yang berdasarkan Undang-Undang atau atas keputusan bersama Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis termotivasi untuk menulis penelitian tentang: *“Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Pengadilan militer III-16 Makassar)*

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Penyelesaian Perkara Desersi Secara *In Absensia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Pengadilan Militer).

2. Deskripsi Fokus

Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengertian Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara adalah tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan, dimana hakim memeriksa dan mengadili seseorang sehingga dijatuhkannya putusan. Secara Umum penyelesaian suatu perkara dapat

⁷Ruslan Renggong., *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia group, 2014) h.219.

dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan).⁸

b. Pengertian Desersi

Desersi adalah suatu pelanggaran dimana seseorang ingin merasa bebas sehingga ia pergi atau meninggalkan tugas atau jabatan tanpa permisi/izin dan dilakukan dengan tanpa tujuan kembali.

c. Pengertian *In Absensia*

In absensia adalah dimana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

d. Pengertian Militer

Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁹ Adapun disini kita ketahui militer yang ada di Indonesia yaitu Tentara Nasioan Indonesia(TNI) yang terdiri dari TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, TNI angkatan Udara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis dapat memberikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini:

1. Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana desersi oleh TNI?
2. Bagaimana proses penyelesaian Tindak pidana desersi secara *In Absensia* yang pelakunya tidak ditemukan di pengadilan Militer III-16 Makassar ?

⁸ <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6281> Arpin dan Harista, *Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Jurisprudentie, Fakultas Syariah dan Hukum.2018.

⁹S. R. Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasioanl Indonesia, 2010, h. 28.

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian yang terdahulu telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang terdahulu telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Fatmawati Fharuddin, Proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara in absensia, fakultas hukum, universitas hasanuddin, 2014, fokus penelitian ini, yakni untuk mengetahui pertimbangan yang mendasari pembenaran (justifikasi) dalam tindak pidana desersi secara In Absensia di pengadilan militer III-16 Makassar, selain itu penelitian ini juga memfokuskan untuk mengetahui bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi secara In Absensia di pengadilan militer III-16 Makassar.
2. Caecilia Septin Birana, Tinjauan yuridis terhadap pemeriksaan absensia pada tindak pidana desersi, fakultas hukum, universitas hasanuddin, 2017, fokus penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *In Absensia*, selain itu penelitian ini juga memfokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim pada peradilan In Absensia pada tindak pidana desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/AD/2015.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pada dasarnya penelitian ini mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana proses penyelesaian perkara desersi *In Absentia* di pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan pasal KUHPM pasal 87 tentang desersi.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang mampu mempengaruhi vonis hukuman pelaku desersi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun secara teoritis.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana militer.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada prajurit maupun masyarakat serta bagi penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Desersi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, desersi ialah suatu pelanggaran yang meninggalkan dinas atau jabatan secara berturut-turut tanpa izin kepada atasan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai desertir.¹⁰

Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi ialah militer tidak izin menjauhkan diri dengan maksud untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas tanggungjawabnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang militer. Desersi ialah tidak beradanya seorang militer tanpa izin kepada yang berwajib (atasan) langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah diterapkan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut ialah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas”.

Tindak pidana desersi ialah suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang angkatan perang atau disebut dengan militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Bentuk-bentuk desersi, diuraikan dalam buku Badan Pembinaan Hukum TNI berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi ialah:

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 257.

1. Bentuk Desersi Murni ialah Desersi Karena Tujuan

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selama-lamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu ialah desersi.
- b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang.
- c. Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh ialah maksud atau tujuan dari pelaku untuk meninggalkan dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi.
- d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Artinyai memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

2. Bentuk Desersi Karena Waktu Sebagai Peningkatan Kejahatan Dari Ketidakhadiran Tanpa Izin

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut.
- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat Negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik.
- c. Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.¹¹

Ada empat macam cara atau keadaan yang diuraikan sebagai bentuk desersi murni ialah:

- a. Militer yang pergi dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya;
- b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
- c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh; dan
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.¹²

Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban-kewajiban dinas seorang Anggota militer, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi (petindak) itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus

¹¹ BisdanSigalingging, S.H., M.H. “Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer”(23 September 2011) <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>. (Diakses 20 Januari 2019)

¹² S.R.Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. h. 273.

ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer. Pengertian pergi ditegaskan dalam Pasal 95 KUHPM ialah perbuatan menjauhkan diri dari, ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran ialah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut. Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat dalam Pasal 87 KUHPM di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 KUHPM, bahwa yang dimaksud dengan pergi (*verwijderen*) ialah perbuatan-perbuatan:

1. Menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*);
2. Menyembunyikan diri dari;
3. Meneruskan ketidakhadiran pada; atau
4. Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.¹³

Setelah mencermati substansi rumusan beberapa pasal di atas mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, dapat disimpulkan bahwa makna kata “Pergi/Meninggalkan” kewajiban dinas sepenuhnya tidak dapat dikatakan suatu pelanggaran bagi seorang anggota militer, dalam hal ini ketika seorang anggota militer meninggalkan kewajiban dinasnya karena telah mendapatkan izin dari kesatuannya maka hal ini bisa dikatakan bukan sebuah pelanggaran. Terkecuali kalau ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ketempat ia bertugas, maka tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu “dengan izin”.

¹³S.R.Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, h. 273.

Hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satumaksudnyaseorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dalam kurung waktu yang telah ditentukan, maka perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur-unsur dikatakan sebuah kejahatan yang tergolong desersi.

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer, Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat maupun secara tersirat.

Berdasarkan hal tersebut, jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian anggota militer tersebut bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun kepergiannya itu "dengan izin" dan sekaligus tindakan

atau perbuatan sedemikian itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.¹⁴

Pasal 87 ayat (1) ke-2 menegaskan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa sebagai batas tindak pidana desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari. Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya adalah penjara dan pemecatan dari anggota militer, karena terdapat ancaman pidana dalam pasal tersebut. Jika ketidakhadiran dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa izin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer (misalnya karena keterlambatan hadir dalam kesatuan militer. Tidak hadir tanpa izin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Secara administratif, berdasarkan Juklak Kasal disebutkan desersi yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UU No.26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan UU

¹⁴S.R.Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, h. 273.

Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI, menegaskan, "Pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit".

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini seperti push up dan lari keliling lapangan. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer. Tindak pidana ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), perkaranya sederhana dan mudah pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa penahanan ringan paling lama selama 14 (empat belas hari) atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Pihak yang berhak menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap

anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin.

Bentuk-bentuk desersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku ketentuan Pasal 88 KUHPM.

(1) Maksimum diancam pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan:

1. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
 2. Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.
 3. Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
 4. Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas.
 5. Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.
 6. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.
 7. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau amunisi.
- (2) Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat

(1) nomor 1 s/d 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.¹⁵

Maksud dari pasal di atas adalah pemberatan. Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 1 KUHPM lazim disebut perulangan atau *recidive* yakni sipelaku sudah pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, maka dalam hal seperti ini, desersi atau tidak hadir dengan tidak sah dilakukannya dengan sengaja. Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Tenggang masa kadaluarsa (*verjaring*) perbuatan tersebut adalah: satu tahun untuk pelanggaran ringan; dua tahun untuk pelanggaran berat; dua tahun untuk pelanggaran ringan; dan lima tahun untuk pelanggaran ringan. Khusus untuk kejahatan desersi masa kadaluarsanya dua belas tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.

Maksud dari Pasal 88 ayat (1) nomor 2 KUHPM di atas, pemberatan dikarenakan adanya kerja sama antara para pelaku, baik yang dilakukan secara sadar atau secara tidak sadar dan tidak perlu terjadinya kejahatan-kejahatan itu pada saat yang bersamaan. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 3 KUHPM diberikan apabila yang memerlukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah bagi seseorang anggota militer yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri.

Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 4 KUHPM bagi anggota militer yang sedang melakukan dinas dimana mereka yang secara nyata-nyata sedang dalam keadaan melakukan tugas dinas. Arti melaksanakan dinas lebih luas daripada pengertian sedang melaksanakan tugas. Hal yang juga memberatkan bagi pelaku dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 5 KUHPM jika kejahatan desersi itu tidak

¹⁵S.R.Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. h. 280-281.

hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri atau melakukan desersi pergi ke luar wilayah NKRI. Memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 6 apabila kejahatan itu dilakukan dengan membawa perahu atau kapal, pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan yang termasuk kepunyaan TNI.

Kajahatan ini mungkin suatu perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana yaitu seial melakukan desersi, juga melakukan pencurian terhadap perlengkapan militer. Hal yang memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 7 KUHPM di atas ialah kejahatan tersebut dilakukan dengan membawa binatang, senjata atau mesiu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan TNI. Binatang yang dimaksud di sini yaitu binatang-binatang yang bisa digunakan untuk kepentingan TNI misalnya kuda, anjing, merpati pos, dan lain-lain yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.

Sementara maksud pada ketentuan Pasal 88 ayat (2) KUHPM menentukan hal yang lebih memberatkan lagi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM ini diduakalikan. Hal yang memberatkan itu apabila si pelaku melakukan kejahatan yang disertai atau tidak dengan sah karena disengaja, disertai dengan dua orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dari nomor 1 s/d 7 KUHPM.

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistim Peradilan Pidana Militer, dimana bentuk penjatuhan pidana militernya terdapat di dalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok (yakni: pidana mati; penjara;

kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI; penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM).

Bagi anggota TNI yang terlibat masalah perdata (baik sebagai tergugat maupun penggugat) maka untuk penyelesaiannya melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan apabila yang dihadapi adalah masalah yang ada hubungan dengan perceraian maupun waris menurut hukum islam maka penyelesaian melalui peradilan Agama. Mengenai gugatan tata usaha militer, apabila ada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha militer maka sesuai dengan hukum acara tata usaha militer pada Bab V Pasal 265 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, gugatan diajukan, ke Pengadilan Militer Tinggi, namun sampai saat ini Peradilan Tata Usaha Militer tersebut belum terwujud, karena belum ada Peraturan Pemerintahnya.

Unsur-unsur tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang ditegaskan berikut: “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:

1. Militer;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
4. Dalam masa damai; dan
5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian bahwa unsur:

1. Militer

- a. Menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas.
- b. Baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini terdakwa sebagai anggota militer/TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara.
- d. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan, Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

2. Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) di dalam KUH Pidana tidak ada pengertian maupun penafsirannya secara khusus, tetapi penafsiran “Dengan sengaja atau kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugastugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya

ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seizin yang sah dari Komandan atau Kesatuannya atau kewajibannya sebagai anggota TNI.

4. Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dimasa damai berarti bahwa terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

5. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

B. Peradilan *In Absensia*

Dalam bacaan online Wikipedia indonesiadilansir bahwa ***In absensia*** adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan ketidakhadiran". Dalam istilah hukum, pengadilan *in absensia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, hal ini tidak diatur secara jelas, kecuali di dalam pasal 196 dan 214 yang mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan *in absensia*. Peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: karena terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri; adanya usaha pembangkangan dari terdakwa (misalnya melarikan diri); atau terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah (pasal 38 UU RI No 31 Tahun 1999).¹⁶

Dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan

¹⁶<http://id.wikipedia>. *In Absensia*, 14 Juni 2006, ([Diakses](#) 28 Januari 2019).

pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan pada umumnya dalam perkara perdata yang menhadiri sidang pengadilan hanyalah wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut. Sebaliknya dalam perkara pidana umum menghendaki hadirnya terdakwa agar nantinya hak-hak kebebasannya dapat dibela dan diperjuangkan didepan persidangan. Dalam hal ini terdakwa masih memiliki hak untuk membela diri dan belum dianggap bersalah selama ia belum divonis oleh pengadilan.

Pada penjelasan Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 merumuskan bahwa Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.¹⁷ Substansi rumusan Pasal 143 memberikan persyaratan persidangan desersi dapat dilakukan secara inabsensia, yaitu:

1. Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke pengadilan.
2. Telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyelidikannya dilakukan secara in absensia.

Dalam praktik sehari-hari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan, maka sidang tersebut akan ditunda hingga terdakwa dapat menghadiri persidangannya sendiri. Hal ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan. Lain halnya jika terdakwa ada dalam tahanan maka tidaklah sulit untuk menghadirkan

¹⁷Penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1997. *Tentang Peradilan Militer*. h.26.

terdakwa mengikuti persidangan. Sebaliknya keadaan akan jauh berbeda jika terdakwa tidak ditahan, terlebih lagi apabila ia telah berpindah-pindah alamat tanpa ada pemberitahuan kepada pihak berwajib. Sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum begitu sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk.¹⁸

Adakalanya terdakwa tidak dapat dihadapkan ke sidang pengadilan, karena terdakwa bertempat tinggal diluar negeri atau bepergian ke luar negeri untuk menghindari penuntutan, sehingga atas berlakunya hukum pidana yang terbatas dalam wilayah negara, sehingga penangkapan tidak dapat dilakukan begitu saja, walaupun alamatnya diketahui dengan jelas. Selain itu dapat pula terjadi keadaan terdakwa melarikan diri setelah dilakukan penangkapan/pemeriksaan, apabila hal ini terjadi maka terdakwa dianggap telah sengaja menghindarkan diri dari penyelidikan ataupun pemeriksaan sidang, maka menjadi kewajiban penyidik untuk melakukan penangkapan. Akan tetapi lain halnya apabila terdakwa dalam keadaan sakit sehingga tidak sempat menghadiri sidang, hal tersebut merupakan pengecualian untuk tidak menghadiri persidangan hingga ia sembuh kembali.

Sesuai yang dimuat oleh Hukumonline.com dalam situsnya menyatakan bahwa ada Enam Masalah Hukum Putusan Desersi Secara In-Absensia.

Pertama, berkas perkara tidak dilengkapi dengan pemeriksaan terdakwa oleh penyidik, tetapi pada saat sidang terdakwa hadir. Dalam kasus seperti ini apakah majelis dapat memeriksa dan memutus perkara dengan menjatuhkan hukuman badan dan pemecatan dari dinas militer. Terhadap masalah ini, bisa dipakai asas pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Komisi Teknis Peradilan Militer Rakerna Mahkamah Agung pada 2007 menyimpulkan kehadiran

¹⁸ Djoko Prakoso, S.H., *Peradilan In Absensia Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.55.

terdakwa di persidangan menggugurkan sifat in-absensia perkara. Hakim seharusnya menyatakan tuntutan oditur tidak dapat diterima.

Kedua, jika surat dakwaan bersifat kumulatif, antara desersi dan tindak pidana lain. Apakah desersi diputus in-absensia, sedangkan tindak pidana lain dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O (*niet ontvankelijke verklard*). Dalam hal ini majelis seharusnya tidak memutus kedua perkara secara in-absensia. Sesuai Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan in-absensia hanya untuk desersi. Seharusnya majelis memutus N.O kedua perkara. Apabila terdakwa ditemukan atau ditangkap belakangan, perkara disidangkan dengan hadirinya terdakwa. Nebis in idem tidak berlaku di sini.

Ketiga, bisakah mengubah tanggal pengumuman putusan dalam hal terdakwa tiba-tiba ada menjelang pengumuman putusan? Dalam hal ini, Komisi Teknis Peradilan Militer menyimpulkan dalam mengumumkan perkara in-absensia, tanggal pengumuman dan tanggal pada Berita Acara penempelan pengumuman tidak boleh dimanipulasi. Tanggal harus sesuai dengan yang sebenarnya. Hak untuk mengajukan banding harus diberikan sesuai ketentuan, yakni dihitung sejak putusan in-absensia diumumkan.

Keempat, siapa yang membayar biaya perkara dalam hal putusan desersi secara in-absensia? Merujuk Pasal 180 UU Peradilan Militer, yang membayar biaya perkara adalah pihak yang dihukum. Jika terdakwa in-absensia dijatuhi hukuman, maka dialah yang menanggung beban biaya perkara. Cuma, Komisi Teknis Peradilan Militer tak memberikan jawaban apabila terdakwa tak pernah lagi ditemukan. Bagaimana pertanggungjawaban biaya perkara itu dalam konteks keuangan negara.

Kelima, bolehkah hakim langsung memeriksa saksi pada sidang pertama padahal terdakwa tak ada meskipun sudah dipanggil tiga kali secara sah? Dalam

hal ini, pertama-tama hakim harus memastikan pada sidang perdana dan kedua bahwa terdakwa sudah dipanggil secara patut dan sah tiga kali berturut-turut. Jika sudah yakin prosedur pemanggilan dilakukan secara sah, maka pada sidang ketiga hakim menyatakan perkara diperiksa secara in-absensia. Selanjutnya oditur membacakan surat dakwaan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Keenam, terdakwa datang setelah putusan desersi secara in-absensia dijatuhkan. Ia beralasan surat panggilan sidang tak sampai, atau salah alamat karena yang bersangkutan sudah pindah kesatuan, atau lagi bertugas sebagai penjaga perdamaian PBB di luar negeri.

Dalam hal ini, jika perkara belum berkekuatan hukum tetap, terdakwa bisa mengajukan upaya hukum banding. Jika sudah berkekuatan hukum tetapi ia bisa mengajukan peninjauan kembali (PK). Dalam hal terdakwa belum bisa menghadap, panitera pengadilan militer membuat catatan, lalu dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam buku register perkara.¹⁹

C. Pengertian Hukum Pidana Militer

Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana militer (dalam arti material dan formal) ialah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Selain itu dalam hukum pidana militer juga telah ditur cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana kepada para pelanggarnya demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum dilingkup Militer.²⁰

¹⁹<https://www.hukumonline.com>, *Enam Masalah Hukum Putusan Desersi Secara In-Absensia*, 06 Oktober 2014 (dkses 30 Januari 2019).

²⁰S.R.Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. h. 18.

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 bahwa Pada dasarnya Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.²¹

Menurut pasal 46 KUHPM yang menjadi subjek hukumnya antara lain:

1. Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu.
2. Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.²²

Pasal 47 KUHPT ayat 1 termasuk pula sebagai tentara adalah:

1. Para bekas anggota tentara yang dipergunakan oleh suatu dinas ketentaraan.
2. Para komisariss wajib militer yang berpakaian dinas seragam sementara setiap kali mereka melakukan tugas-tugasnya selalu itu.
3. Para pensiunan perwira sebagai suatu anggota dari pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas seragam tentara, setiap kali mereka melakukan tugas selalu itu.
4. Mereka yang mempunyai pangkat Tetuler, baik yang diperbolehkan padanya atau atas kekuatan undang-undang ataupun pada waktu keadaan bahaya atau atas kekuatan peraturan dewan pertahanan Negara

²¹Penjelasan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 *Tentang Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015, h.13.

²²Moch. Faisal Salam, SH., MH., *Peradilan Militer di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 53.

5. Mereka yang sebagai anggota dari suatu badan organisasi disamakan atau dianggap sama dengan angkatan perang.

Pada dasarnya adabeberapa uraian pasal di atas dapat dikatakan bahwa hukum pidana militer ialah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi anggota militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya. Hukum pidana militer tak hanya dalam KUHPM, akan tetapi juga diatur dalam perundang-undangan lainnya termasuk putusan-putusan Mahkamah Militer, bahkan juga dalam kesadaran hukum masyarakat militer khususnya.

Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer ialah hukum khusus, disebut hukum khusus dengan maksud untuk membedakan dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi setiap orang. Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi seorang militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Hukum militer pada hakikatnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia.²³ Sebab militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Kita kenal dalam sejarah misalnya dulu dalam kafilah. kafilah di Padang pasir tanah Arab sudah ada orang-orang yang ditugasi untuk siap bertempur melawan musuh-musuh yang akan mengganggu kafilahnya.

Hukum acara pidana militer diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 dimana di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa bagi hukum acara pidana pada peradilan militer berlaku sebagai pedoman HIR dengan perubahan-perubahan

²³ Amiroeddin Sjarif, S.H., M.H. *Hukum Disiplin Militer*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h 2-3.

seperti yang dimuat di dalam undang-undang ini. Dengan dicabutnya HIR , maka kata HIR pada pasal-pasal Undang-Undang No. 6 tahun 1950 tersebut harus dibaca KUHP sebagai pedoman.²⁴

Sama halnya dengan yang diutarakan pada pidato Dies Natalis AHM-PTHM ke-32 bahwa arah pembangunan hukum militer indonesia harus memedomani setidaknya-tidaknya tiga kelompok asas atau prinsip kemiliteran ialah:

1. Asas dibidang pertahanan keaamanan negara seperti:
 - a. Asas kesemestaaan untuk melaksanakan pertahanan keamanan negara (HANKAMNEG)yaitu sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat merupakan penerapan kesemestaan dari kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam pembelaan negara.
 - b. Asas kerakyatan yang berarti keikutsertaaan seluruh rakyat warga negara dalam HANKAMNEG yaitu asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
 - c. Asas kewilayahan, yang berarti bahwa setiap jengkal tanah persada adalah tumpuan perlawanan, yang jika perlu dalam bentuk perlawanan secara berlanjut (gerilya).
 - d. Asas tidak mengenal menyerah (kendati dalam hal ini tidak mutlak) mereka yang memiliki komitmen tidak mengenal kata menyerah yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan keamanan negara.
 - e. Asas mendahulukan kecintaan kepada tanah air daripada kedamaian yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air.
 - f. Asas Defensif-Ofensif atau Defensif-Aktif

²⁴Moch. Faisal Salam, SH., MH. , *Peradilan Militer di Indonesia*. h. 52-55.

Defensif adalah suatu sikap yang menunjukkan bertahan, sedangkan ofensif kebalikan dari defensif yaitu keadaan dimana menunjukkan menyerang.

- g. Asas setia kawan, (kendati harus disadari bahwa dalam percaturan politik internasional tidak ada kawan atau lawan yang permanen.

2. Asas-asas dibidang pengorganisasian militer yaitu:

- a. Komando tunggal (*unity of command*)

Unity of command adalah kesatuan perintah bertalian erat dengan pembagian kerja.

- b. Pembagian tugas yang serasi (*homogenous assignment*)

Karena perlu adanya pembagian tugas tanpa adanya pembagian tugas pasti salah satu anggota ada yang keberatan dan tak seimbang dengan adanya pengurus bisa menopang kerja sama antara organisasi karena dengan pembagian tugas pasti akan serasi, seimbang, dan terlihat kerja sama yang baik.

- c. Delegasi kekuasaan (*delegation of authority*)

Delegasi adalah pemberian sebagian tanggung jawab dan kewibawaan kepada orang lain.

- d. Rentang dan penggunaan pengawasan (*spanned & spent of control*)

Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

- e. Rantai Komando (*chain of command*)

Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa.

- f. Kekenyalan (*flexybelity*)

Kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok

g. Mobilitas (*mobility*)

Gerakan individu atau anggota masyarakat dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain.

h. Kesederhanaan (*simplicity*)

Simplicity adalah kualitas sederhana, mudah untuk dimengerti atau juga bisa disebut sebagai kualitas untuk merencanakan sesuatu yang tidak ribet atau kompleks.

i. Pembekalan sendiri (*self sufficiency*)

Kebijakan kawasan mandiri yang diberlakukan Jepang di Indonesia saat masa pendudukannya di Indonesia.

3. Asas di bidang sengketa bersenjata antara lain;

a. *Reseiprositas* (timbal balik)

Hubungan antara orang yang melibatkan saling tukar hadiah barang, jasa, atau bantuan.

b. Pembalasan (*reprisal*)

Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Reprisal merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain.

c. *Proposionalitas* (keseimbangan)

Proposionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparaturnya yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

d. Kesamaan hak dan derajat

Kesamaan hak adalah sesuatu yang mutlak harus diterima oleh orang banyak. Jika ada sekelompok orang, dimana mereka tidak mendapatkan

persamaan haknya, maka sekelompok orang itu akan merasa tidak dianggap. Persamaan hak seseorang telah ada sejak dia lahir.

e. Tidak mengadakan intervensi (mencampuri urusan negeri orang lain)

Intervensi adalah dimana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya.

f. Menjunjung tinggi harkat manusia.²⁵

Martabat dan harga diri bangsa itu akan dijunjung dan dipertahankan oleh bangsa yang bersangkutan untuk mempertahankan martabatnya, suatu bangsa akan berjuang dengan sekuat tenaga karena hal itu demi kehormatan dan kejayaan bangsanya.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 6 tahun 1950 adalah ketentuan-ketentuan KUHP ditetapkan dalam lingkungan peradilan militer untuk meteri dan hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas pokok yang terdapat dalam hukum acara pidana militer baik yang tersurat maupun tersirat. Didalam KUHP banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang baru yang tidak diatur dalam hukum acara pidana militer, sehingga KUHP sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sekaligus melengkapi aturan yang ada dalam hukum acara pidana militer utamanya yang bersifat umum.

Permasalahan yuridis dan kendala sistemik yang muncul dalam setiap tahap subsistem peradilan militer ialah.²⁶:

1. Masalah Penyidikan

Dalam KUHP dinyatakan bahwa penyidik dalam perkara pidana umum adalah polisi, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Polisi

²⁵S.R.Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, h.15-16.

²⁶Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*,h 136-137

Militer. Perlu adanya regulasi yang jelas penyidik yang berwenang terhadap TNI yang melakukan tindak pidana umum. Bila koordinasi dimungkinkan dilakukan, harus ditentukan pejabat penyidik sebagai pengendali.

2. Masalah Keankuman dan Kepaperaan

Dalam Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1997 dikenal lembaga keankuman dan kepaperaan yang memiliki peran dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI. Timbul suatu pertanyaan terhadap peran lembaga Keankuman dan Kepaperaan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum menurut Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Ankum dan Kepaperaan dalam sistem Peradilan Militer sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol pasukannya dalam rangka membina personel untuk tetap menjaga kesiapan kesatuan.

3. Masalah Penuntutan

Dalam KUHP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah jaksa, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa penuntut dalam Peradilan Militer adalah oditur militer, Ketika prajurit disidangkan di Peradilan Umum dipertanyakan siapakah penuntutnya, apakah jaksa atau oditur militer. Bila dimungkinkan koordinasi dilakukan, perlu ditetapkan pejabat penuntut sebagai pengendali.

4. Masalah Hakim Persidangan

Terdapat suatu pendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana umum yang dilakukan prajurit TNI di Peradilan Umum perlu adanya salah satu hakim yang berlatar belakang militer. Argumentasi dilandasi pandangan bahwa militer

memiliki tata kehidupan atau kultur maupun kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat umum.

5. Masalah *Locus Delicti*

Bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI terjadi didalam lingkungan ksatrian atau markas TNI. Hal ini berkait dengan proses penyidikan dan adanya kewenangan komando di dalam suatu markas ksatria militer. Hal ini perlu dipikirkan karena menyangkut rahasia negara.

6. Masalah Pelaksanaan Eksekusi

Pertanyaannya adalah dimana pelaksanaan eksekusi bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, apakah di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau Lembaga Pemasyarakatan, khususnya bagi mereka yang masih berdinis aktif atau tidak dipecat dalam putusan hakimnya.

Masalah tersebut diatas merupakan beberapa permasalahan menonjol yang menjadi bahan pertanyaan di lingkungan prajurit TNI dan masih terdapat banyak penataan ulang yang harus dilakukan sebagai konsekuensi penerapan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Tindak Pidana Militer:

Tindak pidana militer ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang berhubungan dengan tanggungjawabnya, dimana dikhususkan anggota militer dalam tulisan adalah TNI. Seorang anggota TNI selalu diperhadapkan oleh berbagai tugas yang berhubungan dengan kepentingan negara, selama mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota militer tak sedikit dari mereka terkadang melakukan suatu pelanggaran yang berdampak kerugian pada diri sendiri dan terlebih-lebih terhadap negara. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam pandangan hukum militer, sehingga perlu adanya tindakan/hukuman yang dapat mengatur kedisiplinan dan ketertiban para anggota militer selama melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara.

Peradilan Militer saat ini telah memiliki posisi yang sangat kuat karena telah dicantumkan dalam Konstitusi. Peradilan Militer tetap berpuncak ke Mahkamah Agung, bukan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Lebih dari itu, keberadaan Peradilan Militer bukanlah semata-mata untuk menegakkan hukum dan ketertiban di lingkungan TNI, tetapi untuk menjaga TNI tetap kuat dan solid, dan TNI yang kuat serta solid akan berpengaruh pada eksistensi NKRI.²⁷ Dengan adanya hukum militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi militer berlaku bagi hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Di dalam pasal 1 KUHPM berbunyi:

(diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1947) Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang berlaku bagi militer adalah sebagai berikut:

Sebagai warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara ialah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok.²⁸ Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM yang dapat dibedakan menjadi dua bagian pokok ialah:

²⁷ Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*.(Bandung:PT.Refika Aditama,2017), h.170.

²⁸ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*.h.14.

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni ialah suatu tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang anggota militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.²⁹

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota TNI berkenaan dengan tanggungjawabnya dan tidak melaksanakan tugas yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan demi kepentingan militer dapat dikatakan sebagai tindak pidana militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer murni sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer yang termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, kejahatan menarik diri kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Adapun contoh tindak pidana militer murni yang sering terjadi dikalangan anggota TNI adalah sebagai berikut:

- a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian suatu pos yang diperkuat, kepada musuh tanpa usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut / diharuskan dari padanya.
- b. Kejahatan desersi (meninggalkan dinas tanpa izin lebih dari 30 hari berturut-turut).
- c. Meninggalkan pos penjagaan.³⁰

²⁹S.R.Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. h. 19.

³⁰S.R.Sianturi, S.H, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, h. 19.

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran ialah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada dasarnya telah ditetapkan dalam perundang-undangan lain yang telah ada sebelumnya, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai seorang militer, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan melalui pasal 52 KUHP.

Alasan pemberatan pidana bagi anggota TNI dirasa sangat diperlukan karena berkenaan dengan hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Misalnya: seorang anggota TNI yang sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan negara, akan tetapi malah sebaliknya dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak.

Tindak pidana militer campuran merupakan tindak pidana mengenai perkara koneksitas maksudnya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUHP. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Pada hakikatnya peraturan disiplin tentara merupakan suatu pengantar, penuntut atau pembimbingan disiplin militer yang berisi landasan-landasan disiplin militer, hak dan kewajiban yang bersifat penting bagi seorang anggota militer.³¹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949, secara detail dijelaskan mengenai lingkup disiplin militer yang mengatur perihal atasan dan bawahan, tingkatan kedudukan berdasarkan kepangkatan, hal-hal dalam menjalankan kewajiban, pengajuan keberatan dan hal-hal berkait dengan pelanggaran disiplin militer dan hukuman-hukumannya. Selain itu, diatur pula

³¹Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, h.80

perihal penghormatan perintah atasan terhadap bawahan serta penghormatan terhadap bendera panji-panji tentara, presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota pemerintahan Republik Indonesia.

Peradilan militer dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan, baik kejahatan umum maupun kejahatan militer, karena berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Militer pada saat dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer masih berwenang mengadili tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.³² Yurisdiksi Peradilan Militer ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang koneksitas. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ini juga membuat kekuasaan kehakiman semakin independen, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dimana sebelumnya kewenangan untuk menentukan peradilan mana yang berhak untuk mengadili ada pada Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri kehakiman. Saat ini. Belum ada definisi Hukum Militer yang baku yang dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk anggota MPR RI yang telah membuat ketetapan tersebut sehingga kemudian terjadi kesalahan berfikir, baik menyangkut pemaknaan hukum militer maupun penempatan status hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dijadikan dalam satu Pasal tentang susunan dan kedudukan TNI. Oleh karena itu, ketetapan tersebut harus diamandemen, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Apabila tetap dipaksakan, maka akan ditemui banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Selain harus mengamandemen beberapa undang-undang, juga

³²Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, h 137-139

masalah penyidikan di markas TNI atau properti TNI dan lebih dari itu akan mengurangi yurisdiksi Peradilan Militer secara drastis sehingga dapat mempengaruhi eksistensi Peradilan Militer. Pelanggaran terhadap hukum, khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang sudah ada. Apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan pidana umum (SPP) dengan komponen (Subsistem) yang terdiri dari Polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan tentunya peran advokat. Adapun pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) yang terdiri dari Ankom, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer, (dan tentunya peran advokat). Selama ini, apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer (SPPM) tetapi dengan keluarnya ketetapan MPR RI VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di Peradilan Umum. Diadilinya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana

D. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian Tindak pidana adalah tahap akhir dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama. Namun meski begitu masih terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kembali mengajukan perkara tersebut melalui upaya hukum banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Hal itu ditempuh mengingat salah satu pihak tidak merasa puas atas keputusan pengadilan.

Sebelumnya kita ketahui bahwa Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³³

Di pengadilan Indonesia terbagi dengan beberapa perkara di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final. Jenis-jenis perkara di peradilan umum dengan peradilan militer meliputi perkara pidana dan perdata hanya saja yang membedakan itu pelaku subjektif atas perbuatannya yang membedakan itu peradilan umum pelaku subjektifnya dari kalangan mana saja sedangkan peradilan militer pelaku subjektifnya dari anggota TNI.

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah hanya mengeluarkan peraturan-peraturan Peradilan Militer, Peraturan pertama hukum militer yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 1946. UU RI ini dikeluarkan mengingat banyaknya pelanggaran

³³Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara), 1987, h.1.

hukum yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Indonesia pada waktu itu. Tidak disadari bahwa fungsi hukum acara atau hukum formal adalah untuk melaksanakan hukum materiil, pada hukum materiilnya belum ada. Akibatnya bahwa UU itu tidak dapat dilaksanakan.

umum di Peradilan Umum akan berpengaruh terhadap eksistensi Peradilan Militer termasuk terbatasnya yurisdiksi Peradilan Militer.

Macam-Macam Perbuatan Pidana:

Dalam hukum pidana umum dikenal delik formil dan materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain melawan Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas.³⁴



³⁴ Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., *Merajut Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 197.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian untuk meneliti yakni deskriptif. Penulis menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai peristiwa hal di daerah tertentu, pada penelitian ini biasanya telah mempunyai berupa data awalan mengenai peristiwa yang akan di teliti.³⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyelesaian penulisan ini saya akan melakukan penelitian di pengadilan militer III-16 Makassar. Adapun alasan penulis sehingga menjadikan pengadilan militer III-16 Makassar sebagai tempat penelitian penulis yakni pengadilan ini bersifat khusus karena mengadili pelaku yang berperkara, pelaku yang dimaksudkan merupakan golongan dari angkatan TNI baik yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran dan sebagaimana judul yang diangkat penulis sangat berkaitan erat dengan pengadilan militer III-16 Makassar yang menjadikan tempat acuan penulis untuk meneliti. Tidak hanya itu pengadilan militer tempat penulis mendapatkan berbagai informasi dalam membedakan penyelesaian perkara antara pengadilan militer dan pengadilan umum.

B. *Pendekatan Penelitian*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan

³⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 8.

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, yang berkaitan erat dengan judul penulisan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Penelitian Pustaka

Metode penelitian pustaka yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh sejumlah data yang berupa bahan pustaka yang sumbernya dari beberapa buku dan berkas perkara serta beberapa peraturan.

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode Penelitian Lapangan yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode ini dimaksudkan agar penulis dapat langsung datang pada lokasi yang akan dilakukan penelitian

b. Metode wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara terkait dengan perolehan sumber atau data yang pada dasarnya dapat diperoleh dari seorang hakim dalam sebuah instansi pengadilan militer, terkait dengan judul peneliti yaitu Penyelesaian Perkara Desersi Secara *In Absentia* di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang dimaksudkan yaitu bersumber dari teknik pengelolaan data primer dengan teknik pengelolaan data sekunder. Adapun maksud pengelolaan data primer yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah yang secara langsung dapat diperoleh dari sumber pertama kali.³⁶ Artinya data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara langsung kepada seorang hakim selaku pihak tertentu yang diberikan wewenang untuk mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara memperoleh dari beberapa literatur yang ada juga dengan studi pustakaan, hasil penelitian, buku dan tulisan serta perundang-undangan yang tidak terlepas dari penelitian ini.

2. Analisis Data

Perolehan data yang dilakukan secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif, pada saatnya akan diuraikan dan dijelaskan serta diumbar sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang tidak jauh kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari

³⁶ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h. 31.

objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi waktu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°CKota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros

- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

2. Pengadilan Militer III-16 Makassar

Lokasi Penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar berada di Jl. Batara, Kel. Pai, Biringkanaya, Pai, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya bernama Mahkamah Militer III-16 Makassar berdiri pada 3 Juni 1982 dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI pada saat itu, Mayjen (TNI) E.Y. Kanter, S.H. berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang tahun 1988 yang kian memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer. Tahun 2004 Indonesia memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan dan Peradilan Militer III-16 Makassar kemudian berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 13 Ayat (1) menetapkan: “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Dengan pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi dan finansial Lembaga Peradilan dari eksekutif kepada yudikatif berdasar UU. No. 4 Tahun 2004 tersebut , maka pembinaan Bidang Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Lembaga Peradilan kini berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Adapun Visi, misi dan fungsi dari Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Militer III-16 Makassar Yang Agung.

Misi:

Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-16 Makassar, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-16 Makassar, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Fungsi:

Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan para pencari keadilan pada tingkat pertama, memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan, memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang TI, kepada semua unsur pejabat, maupun staff di Pengadilan Militer III-16 Makassar, memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Desersi Oleh TNI

Masalah kejahatan ialah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu ialah produk masyarakat.³⁷

Kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (Hukuman dan Tindakan).³⁸

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis lakukan, dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi.

Menurut Hakim Fredy Ferdian, S.H.,M.H.³⁹ ada beberapa Faktor Penyebab terjadinya perkara desersi yang beliau tangani adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Faktor Rumah Tangga

Keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI.

2) Faktor Ekonomi

³⁷ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 5.

³⁸ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 25

³⁹ Wawancara dengan Hakim Fredy Ferdian.S.H.,M.H, di Pengadilan Militer III-16 Makassar, pada tanggal 07 Mei 2019 , Pukul 14:16 WITA

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila

si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga prajurit stres. Dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa bila seseorang hidup dalam serba kekurangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya. Sehingga biasanya mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan TNI melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindakan desersi ini seringkali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah.

3) Faktor Niat

Pelaku tersebut biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang Prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

4) Faktor Perselingkuhan

Seorang TNI yang melakukan desersi biasanya mempunyai wanita lain diluar.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurang pemahaman yang berlaku di lingkungan TNI. Masih terdapat anggotamiliter yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.

2) Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai Karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya.

3) Faktor lingkungan

Biasanya didapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Sehingga iapun terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan tindak pidana desersi.

Namun dari semua uraian faktor-faktor diatas yang paling dominan ialah faktor ekonomi .

Menurut Hakim Fredy Ferdian.⁴⁰ Banyak personil TNI terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, saat ditagih tetapi tidak punya uang, mereka terpaksa melarikan diri.

Hakim Fredy Ferdian juga mengatakan Masalah wanita, termasuk salah satu faktor utama yang menjadi penyebab pemicu terjadinya desersi di kalangan personil TNI. Kecenderungan anggota TNI menjalin hubungan dengan wanita saat mengambil cuti cukup besar sehingga kerap terjadi hubungan badan di luar nikah. Saat wanita itu hamil, terpaksa mereka nikah siri untuk menutupi aib. Saat itulah anggota akhirnya malas dinas karena malu.

Penanganan kasus pelanggaran disiplin dalam militer telah diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM). Jika pelanggaran itu terjadi dalam masa perang, personil TNI yang melakukan desersi diancam penjara selama delapan tahun enam bulan dan jika kondisi aman hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Fredy Ferdian.S.H.,M.H, di Pengadilan Militer III-16 Makassar, pada tanggal 07 Mei 2019 , Pukul 14:16 WITA

Maka dari itu pembinaan mental bagi anggota TNI sangat diperlukan sebagai langkah pencegahan terjadinya desersi.

C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Yang Terdakwanya Tidak Ditemukan Di Pengadilan Militer III-16 Makassar

1. Kasus Tindak pidana desersi Secara *In Absensia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Kasus Tindak pidana desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer III-16 Makassar dari tahun ke tahun mengalami penurunan Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2016	58
2	2017	58
3	2018	47

Sumber data dari: Pengadilan Militer III-16 Makassar

Berdasarkan Table diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus desersi selama 3 Tahun yaitu 163 kasus dimana pada tahun 2016, 2017 jumlah kasus Tindak Pidana deserssi secara *In Absensia* seimbang sedangkan mengalami penurunan pada tahun 2018 dari table diatas dapat disimpulkan bahwa kasus ini marak terjadi di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada saat meneliti di Pengadilan militer III-16 Makassar jika suatu kasus Tindak Pidana desersi secara *In Absensia* yang terdakwanya tidak hadir dalam persidangan maka bagaimanakah cara penyelesaian Tindak Pidana desersi tersebut

Menurut hakim Fredy Ferdian. S.H.,M.H.⁴¹ bahwa desersi itu adalah meninggalkan kesatuan lebih lama dari 30 Hari dan prajurit yang meninggalkan kesatuannya jika kurang dari 30 hari itu dinamakan THTI (Tidak hadir tanpa izin).

Untuk lebih jelasnya, perbandingan delik THTI (Pasal 86) dengan delik Desersi (Pasal 87) KUHPM berdasarkan lamanya ketidakhadiran serta sanksi berdasarkan waktunya, dapat diformulasikan pada table di bawah ini:

DELIK	LAMANYA		SANKSI BERDASARKAN	
	KETIDAKHADIRAN KARENA WAKTU PALING LAMA SENGAJA			
	Damai	Perang	Damai	Perang
THTI	1-30 hari	1-4 hari	9 bulan	1 Thn 4 Bln
DESERSI	31 hari keatas	5 hari keatas	2 Thn 8 Bln	8 Thn 6 Bln

Sumber data dari: Pengadilan Militer III-16 Makassar

Mengenai permasalahan desersi Secara *In Absensia* yang terdakwa tidak ditemukan ada kekhususan didalam Peradilan Militer yaitu menyalahi asas dimana kalau dalam persidangan itu terdakwa harus selalu hadir didalam persidangan tersebut namun dalam perkara penyelesaian tindak pidana desersi dapat dilaksanakan secara *In Absensia* itu dasarnya adalah Pasal 143 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Menurut Penulis Proses penyelesaiannya berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pada umumnya dimana terdakwa harus hadir dalam persidangan tersebut tetapi dalam perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-16 Makassar Persidangan Tetap dilaksanakan walaupun terdakwa tidak hadir atau tidak ditemukan.

⁴¹ Wawancara dengan Hakim Fredy Ferdian.S.H.,MH, di Pengadilan Militer III-16 Makassar, pada tanggal 07 Mei 2019 , Pukul 14:16 WITA

Menurut Hakim Fredy Ferdian. S.H.,M.H.⁴² Bahwa apabila di kesatuan ditemukan personel prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hadir tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang maka satuan berkewajiban memberikan laporan secara berjenjang ke Komando atas disertai upaya pencarian dan dapat minta bantuan polisi militer (POM), namun jika tetap tidak diketemukan maka Atasan Yang Berhak Menghukum (disingkat Ankum) yang bersangkutan berkewajiban memberikan laporan atau melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik polisi Militer. Penyidik Polisi Militer akan melakukan pemeriksaan berupa penyidikan untuk mencari dan menemukan alat bukti tentunya tidak dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa karena terdakwa tidak diketemukan hanya keterangan saja, disamping itu penyidik juga akan mencari saksi-saksi dibantu Provost kesatuan serta staf personel kesatuan terdakwa. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada guna didengar keterangannya dan menuangkan keterangan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah diperiksa maka penyidik akan melimpahkan berkas tersebut kepada Oditur militer. Setelah itu Oditur Militer akan memeriksa apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dalam hal tindak pidana desersi yang terdakwa tidak diketemukan sesudah memeriksa berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (disingkat Papera) yang berupa permohonan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan Militer. Namun karena perkara desersi ia sudah merupakan tindak pidana maka Papera akan mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpah Perkara (disingkat Skeppera) dari Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer . Jadi yang dimaksud dalam pengertian *In Absensia* ialah pemeriksaan tanpa hadirnya

⁴² Wawancara dengan Hakim Fredy Ferdian.S.H.,M.H, di Pengadilan Militer III-16 Makassar, pada tanggal 07 Mei 2019 , Pukul 14:16 WITA

terdakwa pemeriksaan yang dilaksanakan agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka keutuhan pasukan , termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri atau tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer.

Menurut Hakim Fredy Ferdian.S.H.,M.H.⁴³ bahwa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi pada umumnya sama dengan penyelesaian perkara pidana lainnya.

Pada sidang pertama akan dibuka oleh Hakim Ketua diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali. Kemudian Hakim bertanya kepada oditur militer dimana terdakwa? jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan tersebut, kemudian majelis hakim masih memberi kesempatan untuk memanggil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 bahwa oditur militer melimpahkan berkas perkara pada pengadilan militer maka terhitung 6 bulan sejak pelimpahan berkas tersebut. Maka akan diadakan sidang secara *In Absensia*.

Jadi setelah melimpahkan berkas perkara tersebut Persidangan secara *In Absensia* tidak langsung dilaksanakan, terdakwa masih diberi kesempatan kepada kesatuannya, barangkali terdakwa sadar untuk kembali ke Kesatuan sehingga dalam proses 6 (enam) bulan tersebut masih memberikan waktu kepada terdakwa dan kesatuan untuk mencari terdakwa. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak diketemukannya terdakwa maka akan dilanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa yaitu disebut secara *In Absensia*. Proses pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan biasa namun tidak ada pemeriksaan terdakwa. Dan hakim langsung bisa memutus perkara tersebut dengan putusan seperti putusan

⁴³ Wawancara dengan Hakim Fredy Ferdian.S.H.,M.H, di Pengadilan Militer III-16 Makassar, pada tanggal 07 Mei 2019 , Pukul 14:16 WITA

biasa namun dalam amar putusannya tanpa dihadiri oleh terdakwa dan putusan itu akan berlaku secara inkra sejak hakim membacakan putusan tersebut.

Hakim Fredy Ferdian. S.H.,M.H.⁴⁴ Mengatakan apabila terpidana desersi secara *In Absensia* yang kemudian hari akan tertangkap atau menyerahkan diri dan putusannya sudah inkra maka sesuai dengan putusan pengadilan tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam amar putusan yang sering beliau tangani dalam perkara desersi secara *In Absensia* dominan 98% diputuskan dengan pidana tambahan pemecatan dan eksekusinya apabila terpidana ini . Oditur militer langsung bisa mengeksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan selayaknya bunyi amar putusan tersebut apabila amar putusan menyatakan satu tahun dengan pidana tambahan pemecatan maka dia akan menyerahkan terpidana itu kepada lapas umum karena terpidana bukan lagi anggota militer sudah dilakukan pemecatan dari kesatuan sehingga diserahkan kepada lapas umum untuk diproses dan menjalani pidananya satu tahun apabila amar putusannya berbunyi demikian. Namun apabila tidak diketemukan Oditur Militer akan tetap melakukan pencarian.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan tersebut Proses persidangan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga persidangan ini disebut *In Absensia*.

⁴⁴ Wawancara dengan Hakim Fredy Ferdian.S.H.,M.H, di Pengadilan Militer III-16 Makassar, pada tanggal 07 Mei 2019 , Pukul 14:16 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktoryang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI

Penyebab tindak pidana desersi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam

2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Faktor Internal:

- 1) Faktor Rumah Tangga
- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Faktor Niat
- 5) Faktor Perselingkuhan

- b. Faktor Eksternal

- 1) Kurang pemahaman yang berlaku di lingkungan TNI
- 2) Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai
- 3) Faktor lingkungan

Namun dari semua uraian faktor-faktor diatas yang paling dominan ialah faktor ekonomi ia mempunyai hutang piutang kepada orang lain, lalu ia mencoba menghindari permasalahan itu yaitu dengan melarikan diri dari kesatuan.

2. Proses penyelesaian tindak pidana desersi secara *In Absensia* yang pelakunya tidak diketemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absensia* ialah tindak pidana yang terdakwaanya meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997. Jadi, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In Absensia ialah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan

cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

B. *Saran*

1. Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan anggota TNI yang dirasa kurang sebanding dengan tugas dan pengabdian mereka dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi desersi.
2. Diupayakan agar setiap anggota TNI lebih meningkatkan atau benar-benar memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, salah satunya tunduk kepada hukum yang berlaku.
3. Setiap anggota TNI diharapkan benar-benar dapat menegakkan hukum disiplin dan tata tertib didalam kesatuan masing-masing, salah satunya meminta ijin atasan/komandan jika meninggalkan kantor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Zainal Amiruddin dan, *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*.Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Faisal, Moch. Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2002.
- Faisal, Moch Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*.Bandung:Mandar Maju, 2004.
- Heniarti Dewi Dini, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung:PT.Refika Aditama,2017.
- Hasibuan Ridwan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Kartono Kartini, *ABRI dan Permasalahan*. Bandung: CV.Mandar Maju, 1996.
- Prakoso, Djoko,*Peradilan InAbsensia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1985.
- Marjoto, *Hukum Pidana Tentara*, Bogor: Politeia, 1965.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Bina Aksara, 1987
- Mulyadi, lilik, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2007.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadam Media Group, 2014
- Syamsuddin Rahman, *Merajut Hukum Di Indonesia*.Jakarta:Mitra Wacana Media,2014.
- Sianturi, S.R.,*Hukum Pidana Militer di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasioanl Indonesia*, 2010.
- Sjarit, Amiroeddin. *Hukum Disiplin militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipts, 1999.
- Sunggono, Bambang. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015.
- Sumaperwata, Mulya. *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bogor: Alumnus Press, 2007.
- Syarif, Amiroeddin, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Jakarta: Galia Indonesia, 1982.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni, 1982.

Sumber Lain:

Arpin dan Harista, *Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Jurisprudentie, Fakultas Syariah dan Hukum.2018.

(<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6281>)

Undang-Undang:

Undang-undang No. 31 Tahun 1997. *Tentang Peradilan Militer*.

Undang-undang No.34.tahun 2004 tentang *tentara nasional indonesia*.

Undang-undang Republik Indonesia No.25. tahun 20016. *Tentang hukum disiplin militer*.

Internet:

<http://www.GreenNews.com>, "Hukum Pidana Militer di Indonesia", 03/02/2014,

(diakses 21 Januari 2019).

<https://www.hukumonline.com>. *Enam Masalah Hukum Putusan Desersi Secara In-Absensia*", 06 Oktober 2014 (dikses 30 Januari 2019).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miftahul janna, lahir pada tanggal 02 Juni 1997, Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Isbawaihi dan Faridah Djabbar. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari TK Pertiwi (2002-2003), kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyyah Darussalam Serui-Papua (2003-2009), lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah Serui-Papua (2009-2012), kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA NEGERI 1 SEGERI (2012-2015), setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum (2015-2019).





PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Jl. Batara Bira No. 5 Km. 16 Makassar
Telp : (0411) 518080, Fax : (0411) 518080, 518086
Website : www.dilmil-makassar.go.id Email : makassar@dilmil.org

SURAT KETERANGAN

W3.Mil05/ **93** /KP.05.1/ VII /2019

Merujuk Surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-2420/SH.01/PP.00.9/04/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Desersi Secara In Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar :

Nama	: Miftahul Janna
Nim	: 10400115062
Jurusan	: Ilmu Hukum

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Jl. Batara Bira No.5 KM.16 Baddoka, Biringkanaya, Makassar, mulai tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Juli 2019

a.n. Kepala Pengadilan Militer III-16

Sekretaris

Andi Dars Ulang, S.H.
Kapten Sus NRP. 535949